



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO SWP JEMBER  
DAN SEKITARNYA**

**SKRIPSI**

Oleh

**Fisilia Satiti Universitasari  
130810101001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO SWP JEMBER  
DAN SEKITARNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Fisilia Satiti Universitasari  
130810101001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Subiki Surya Putra dan Ibu Tri Rejeki Andayani yang selalu memberikan kasih sayang, doa yang tak pernah henti, dan semangat yang membuat saya menjadi seperti ini.
2. Kakak dan adik saya yaitu Shapbian Novindasari dan Monika Apriliana Suryasari
3. Guru / Dosen saya sejak Playgroup hingga saat ini saya di perguruan tinggi yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu yang tak henti – henti.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap  
(Terjemahan Q.S. Al Insyirah: 5-8)

Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu ke dalam aksimu yang paling kecil sekalipun.  
Inilah rahasia kesuksesan.

(Swami Sivanda)

Jangan pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung. Buatlah jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.

(Ralph Waldo Emerson)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fisilia Satiti Universitasari

Nim : 130810101001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTOSWP JEMBER DAN SEKITARNYA” adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah di ajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 September 2018

Yang menyatakan,

Fisilia Satiti Universitasari

NIM 130810101001

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTOSWP JEMBER  
DAN SEKITARNYA**

Oleh :

Fisilia Satiti Universitasari  
NIM130810101001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agus Luthfi, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si

**TANDA PERESETUJUAN SKRIPSI**

JudulSkripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan  
Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik  
Regional Bruto SWP Jember Dan Sekitarnya  
Nama : Fisilia Satiti Universitasari  
NIM : 130810101001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional  
Tanggal Persetujuan : 31 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Luthfi, M.Si.  
NIP. 196505221990021001

Dr. Regina Niken Wilantari S.E, M.Si  
NIP. 197409132001122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

NIP. 196411081989022001



**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTOSWP JEMBER DAN SEKITARNYA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fisilia Satiti Universitasari

Nim : 130810101001

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

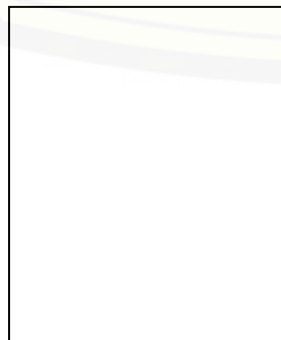
14 September 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purtomo S, M.Si ( )  
NIP. 195810241988031001
2. Sekertaris : Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E,M.Si( )  
NIP.196807151993031001
3. Anggota : Prof. Dr.Mohammad Saleh, M.Sc ( )  
NIP. 195608311984031002

Mengetahui/Menyetujui,



Universitas Jember  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Muhammad. Miqdad, SE.,MM.,Ak.,CA  
NIP. 197107271995121001



## RINGKASAN

**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto SWP Jember dan Sekitarnya;** Fisilia Satiti Universitasari; 130810101001; 2018; 85 Halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lainlain. UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat.

Penelitian ini dilakukan di SWP Jember dan Sekitarnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Analisis Data panel, Uji F, Koefisien Determinasi, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di SWP Jember dan Sekitarnya tahun 2003-2012 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto di SWP Jember dan sekitarnya tahun 2003-2012 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto di SWP Jember dan sekitarnya tahun 2003-2012 menunjukkan hubungan yang signifikan. Dana Bagi Hasil terhadap Produk Domestik Regional Bruto di SWP Jember dan sekitarnya tahun 2003-2012 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

## SUMMARY

**Analysis of the Effect of Regional Original Revenue and Balancing Funds on the SWP Gross Regional Domestic Product of Jember and its Surroundings;** Fisilia Satiti Universitasari; 130810101001; 2018; 85 pages; Economic Development Study Program, Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

National development activities cannot be separated from the role of local governments in utilizing the available resources in their respective regions as an effort to increase regional capacity. For this reason, the increase must be supported by harmonious and integrated regional development in order to realize national development. Regional economic development is a process where local governments and their communities manage existing resources and form a partnership pattern between local government and the private sector to create new jobs and stimulate the development of economic activities in the region (Arsyad, 1997).

Law No. 32 of 2004 which states that for the implementation of the authority of the Regional Government, the Central Government will transfer the Balancing Fund consisting of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Production Sharing Funds sourced from taxes and natural resources. In addition to these balancing funds, the Regional Government has its own funding sources in the form of Regional Original Income (PAD), Financing, etc. Law No. 32 of 2004 states that transfers from the government in the form of DAU, DAK and Revenue Sharing Funds are used for the implementation of regional government authority. Revenue Sharing plays a role as a fiscal balance between the center and the regions of the divided tax. DAU plays a role as fiscal equalization between regions (fiscal equalization) in Indonesia. Whereas DAK acts as a fund based on emergency policies.

This research was conducted at SWP Jember and Surroundings. This study used secondary data obtained from the Central Statistics Agency of East Java Province. The method of data analysis uses Descriptive Statistics, Classical Assumption Tests, and Hypothesis Testing consisting of panel Data Analysis Methods, F Tests, Determination Coefficients, and t Tests. The results of the study show that the Regional Original Income to the Regional Domestic Product of SWP Jember and around 2003-2012 showed a significant positive relationship. The General Allocation Fund for Gross Regional Domestic Products in SWP Jember and its surroundings in 2003-2012 shows a positive significant relationship. Specific Allocation Funds for Gross Regional Domestic Products in SWP Jember and around 2003-2012 show a significant relationship. Revenue Sharing Funds for Gross Regional Domestic Products in SWP Jember and its surroundings in 2003-2012 show insignificant relationships.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto SWP Jember dan sekitarnya”*. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, bantuan berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Subiki Surya Putra dan IbuTri Rejeki Andayani terimakasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, motivasi , kerja keras, kesabaran dan kasih sayang selama ini;
2. Bapak Dr. Agus Luthfi, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, saran dan kritik serta pengarahan terhadap penulis;
3. Bapak Dr. M. Miqdad, SE, MM,Ak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan penelitian ini;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, SE, M.Kes. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan penelitian ini dan motivasi;



5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;
6. Kakak dan adik saya yaitu Shapbian Novindasari dan Monika Apriliana Suryasari;
7. Sahabat saya Ayu Intan Permatasari yang selalu memberikan semangat dan menjadi partner dari kecil hingga sekarang dan selalu menjadi yang terbaik dalam kondisi apapun;
8. Sahabat saya Dini Atika Najah, Nindya Eka Santi, Andirana Okta Fara Diba, Siti Nur Azizah, Maya Noviyanti, Siti Nur Hasanah yang selalu mensupport dan memberikan saran kepada penulis;
9. Sahabat – sahabat Pipao yang selalu memberikan warna dan berita terbaru dalam hal apapun di kehidupan kampus penulis;
10. Seluruh Sahabat – sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu, terimakasih atas bantuan dan supportnya;

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis amat di harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 04 September 2018

Penulis

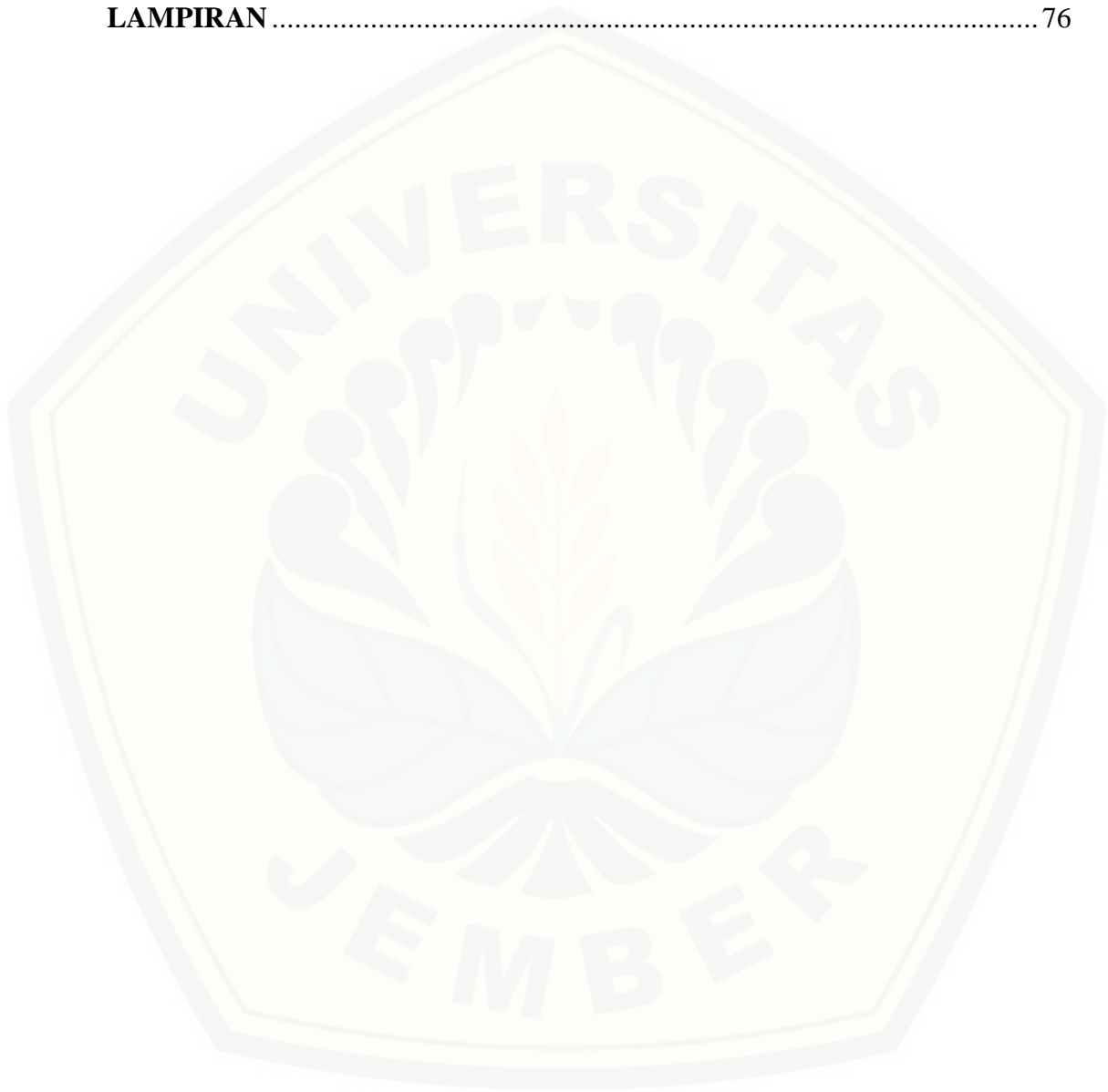
**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERESETUJUAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>SUMMARY</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>1.4 Manfaat penelitian</b> .....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	12
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	12
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	14
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	21
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto .....	26
2.1.5 Desentralisasi Fiskal.....	29
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah.....	30
2.1.7 Dana Perimbangan .....	33



2.2	<b>Penelitian Terdahulu</b> .....	36
2.3	<b>Hipotesis</b> .....	41
2.4	<b>Kerangka Konseptual</b> .....	42
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....		43
3.1	<b>Rancangan Penelitian</b> .....	43
3.1.1	Jenis Penelitian .....	43
3.1.2	Jenis Dan Sumber Data .....	43
3.2	<b>Metode Analisis</b> .....	44
3.2.1	Analisis Data panel .....	44
3.2.2	Uji Statistik .....	47
3.2.3	Uji Asumsi Klasik .....	49
3.3	<b>Definisi Operasional Variabel</b> .....	51
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....		54
4.1	<b>Gambaran Umum</b> .....	54
4.1.1	Kabupaten Jember .....	54
4.1.2	Kabupaten Situbondo .....	55
4.1.3	Kabupaten Bondowoso .....	56
4.2	<b>Analisis Deskriptif</b> .....	56
4.2.1	Hasil Uji Hausman Tes .....	57
4.2.2	Analisis Regresi Data Panel .....	58
4.3	<b>Uji Statistik</b> .....	60
4.3.1	Uji F .....	60
4.3.2	Uji t .....	60
4.3.3	Uji Koefisien Determinasi .....	61
4.3.4	Uji Asumsi Klasik .....	62
4.4	<b>Pembahasan</b> .....	65
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB .....	65
4.4.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto .....	67
4.4.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB .....	68
4.4.4	Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap PDRB .....	70

<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	72
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	72
<b>5.2 Saran</b> .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN</b> .....	76

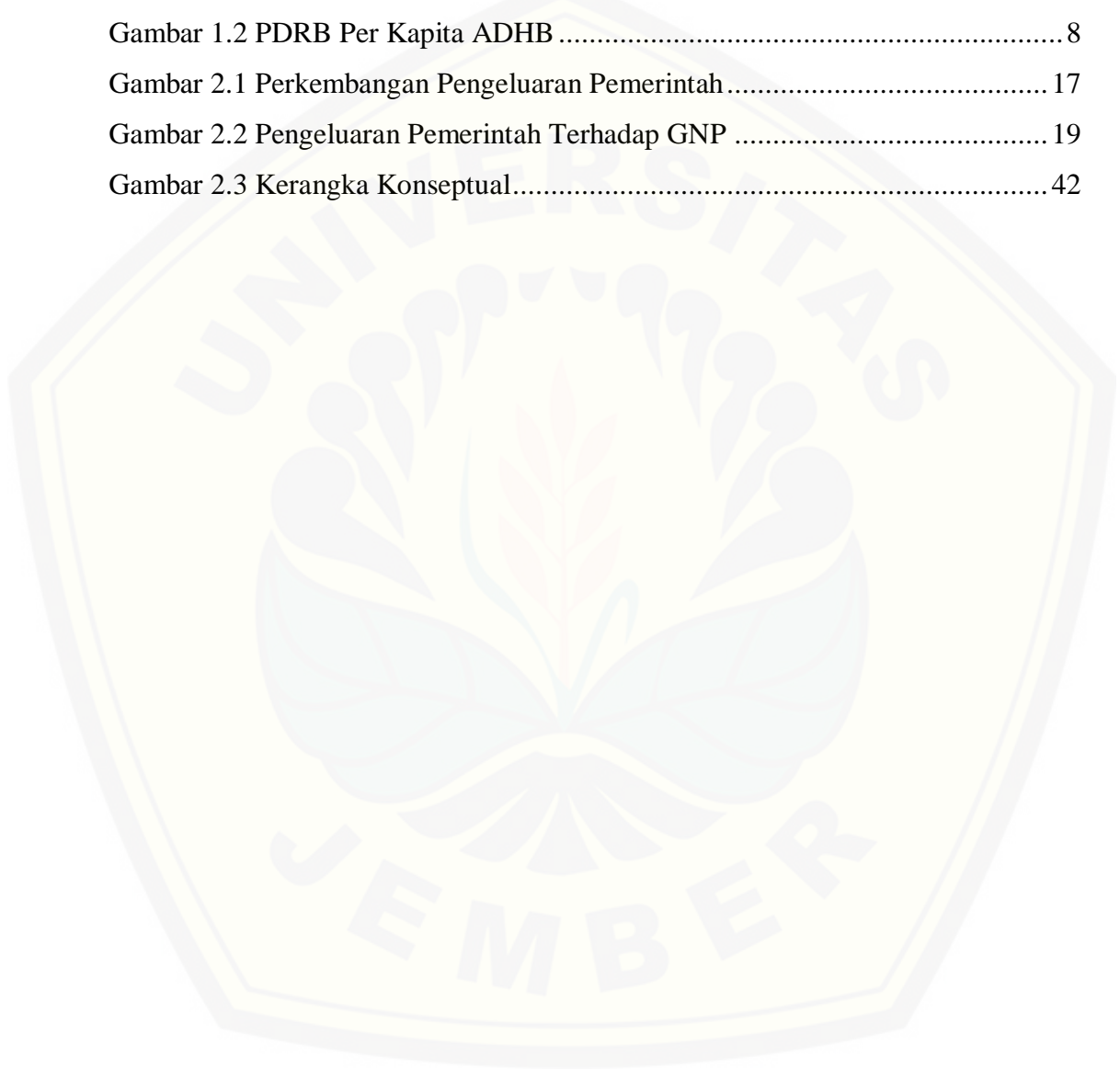


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 .....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman Tes.....	58
Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> .....	59
Tabel 4.4 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.5 Hasil Uji t.....	61
Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi .....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Jarque – Berra Test</i> .....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Glesjer</i> .....	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi.....	65
Tabel 4.11 Data Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah SWP Jember dan Sekitarnya tahun 2003-2012 .....	66
Tabel 4.12 Data Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Alokasi SWP Jember dan Sekitarnya tahun 2003-2012 .....	68
Tabel 4.13 Data Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Alokasi umum SWP Jember dan Sekitarnya tahun 2003-2012 .....	69

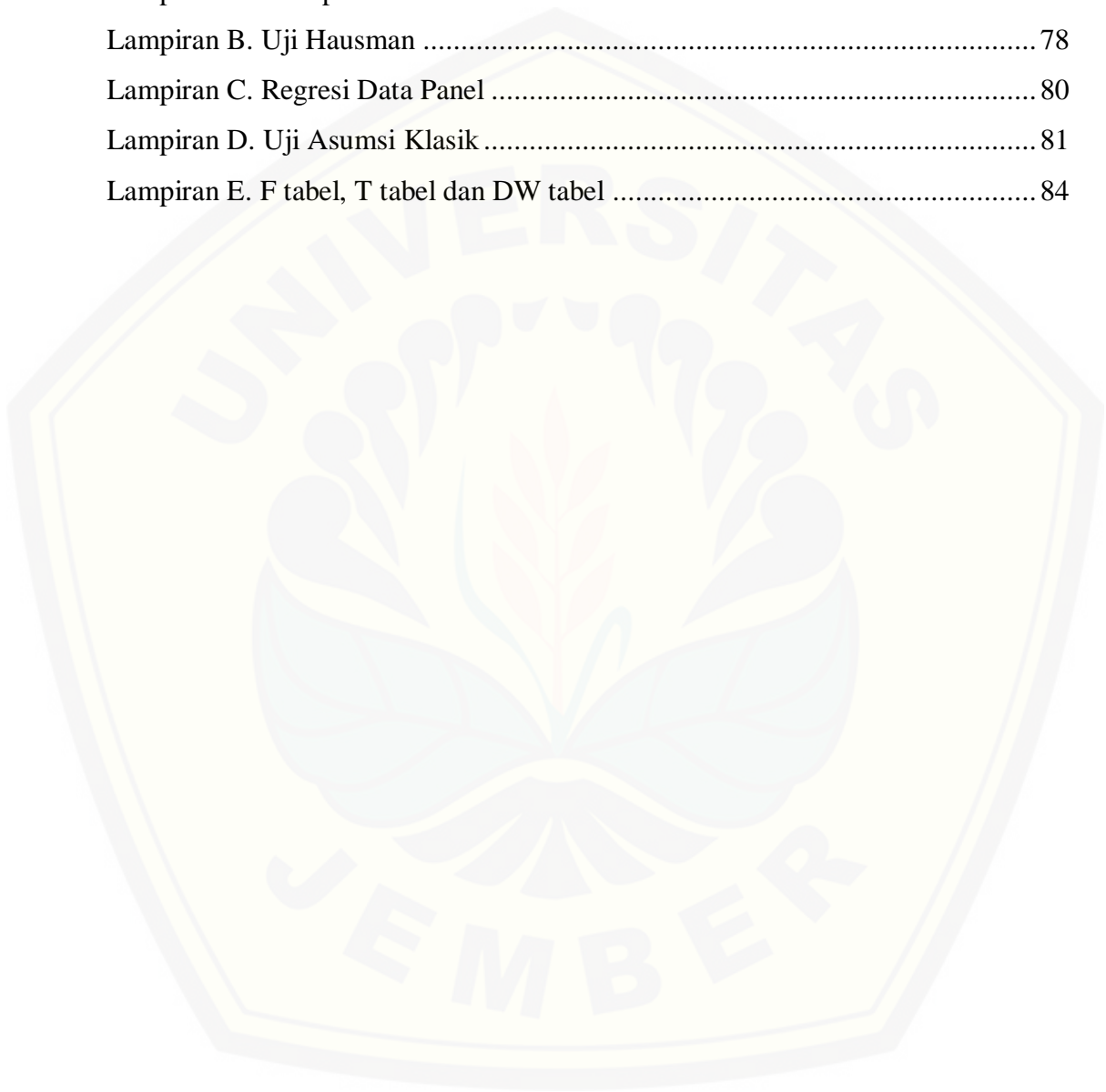
**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010.....	7
Gambar 1.2 PDRB Per Kapita ADHB .....	8
Gambar 2.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	17
Gambar 2.2 Pengeluaran Pemerintah Terhadap GNP .....	19
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual.....	42



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A. Rekapitulasi Data .....	76
Lampiran B. Uji Hausman .....	78
Lampiran C. Regresi Data Panel .....	80
Lampiran D. Uji Asumsi Klasik .....	81
Lampiran E. F tabel, T tabel dan DW tabel .....	84



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat untuk mensejahterakan, adil dan makmur. Berhubung dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia sangat membutuhkan pembangunan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, dan sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi maka diperlukan pembangunan sumber daya manusia untuk mengunggulkan tingkat produktifitas dan juga mengurangi angka kemiskinan di negara Indonesia yang sedang berkembang.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997).

Dalam pembangunan ekonomi daerah, proses majunya pertumbuhan pertumbuhan suatu daerah sering ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB dan APBD. Pembangunan daerah dengan APBD merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Menurut Maryani (2010) dalam Priambodo (2015) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia. Spesifiknya, pemerintah daerah harus bisa



mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM. Pada skala nasional, besaran nilai APBN, baik pendapatan negara dan hibah, serta belanja negara memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Kenaikan anggaran tersebut merupakan indikator tumbuhnya perekonomian Indonesia secara garis besar. Peningkatan anggaran pemerintah tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat melalui APBN-nya, namun juga pada pemerintah daerah melalui APBD-nya. Kenaikan anggaran pada APBD tingkat kabupaten di Indonesia bukan hanya menjadi indikator kemajuan perekonomian daerah, namun juga indikator bahwa kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah semakin baik.

Otonomi daerah juga merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Diberlakukannya Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional.



Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lainlain.UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adanya ketimpangan PAD antara satu provinsi dengan provinsi yang lain di Indonesia, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah.

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Periode dari keseluruhan objek yang akan diteliti adalah tahunan dengan panel data mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2012 di daerah SWP Jember dan Sekitarnya yang

mencakup Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Periode tersebut dipilih untuk tujuan kemutakhiran data, sehingga data yang diolah adalah data yang mempresentasikan keadaan sekarang ini atau paling tidak mendekati masa penelitian ini dilakukan. Pembatasan akhir periode objek penelitian yakni tahun 2012 terkait dengan keterbatasan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan, di mana data realisasi PAD, DBH, DAU, dan DAK yang berasal dari kompilasi atas Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS) baru tersedia secara memadai sampai dengan tahun 2015.

Selain PAD, penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dana perimbangan karena dana perimbangan merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu juga, realisasi dana perimbangan dalam APBN sangat besar dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Alokasi dana perimbangan yang sangat besar diharapkan akan sangat berperan dalam tercapainya tujuan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penulis berharap dengan melakukan penelitian atas dana perimbangan dalam kaitannya dengan produk domestik regional bruto di daerah SWP Jember dan Sekitarnya yang mencakup Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo selama sepuluh tahun terakhir, akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas dana perimbangan dalam menstimulasi atau mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan pencapaian tujuan desentralisasi fiskal.

PDRB Provinsi Jawa Timur yang tinggi bukan berarti tidak ada masalah pada pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur, karena Provinsi Jawa Timur ini sendiri terdiri dari sembilan satuan wilayah pengembangan dan tiga puluh delapan kabupaten dan kota yang memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur dalam pasal 9 menyatakan bahwa terdapat 9 satuan wilayah pengembangan. Satuan Wilayah Pengembangan yang disingkat SWP adalah satuan wilayah dengan satu

atau semua kabupaten/kota-perkotaan mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai sarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air. Berdasarkan paragraf 3 Sistem Pusat Pemukiman Perkotaan pasal 9 huruf c ada 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur, yaitu (Peraturan Daerah Jawa Timur, 2006) :

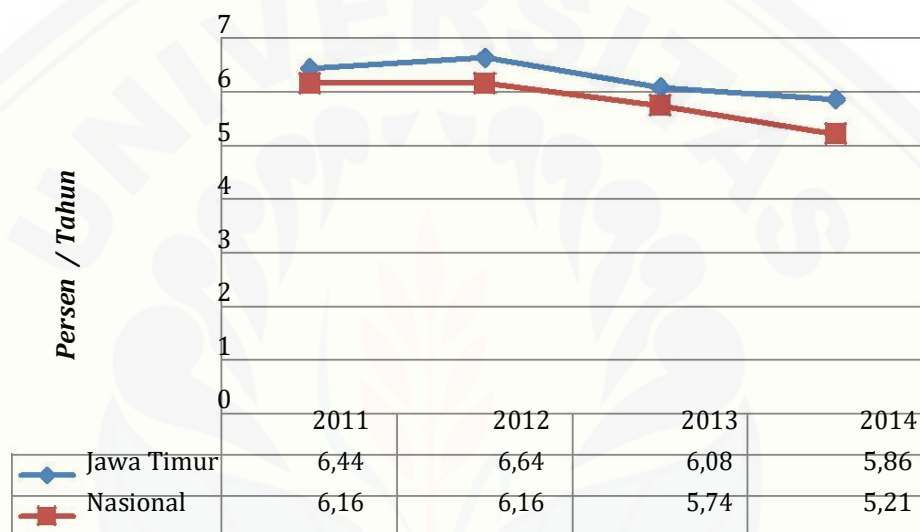
- a. SWP Gerbang kertosusila Plus meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya.
- b. SWP Malang Raya meliputi: Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan pusat pelayanan di Kota Malang.
- c. SWP Madiun dan sekitarnya meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dengan pusat pelayanan di Kota Madiun.
- d. SWP Kediri dan sekitarnya meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan pusat pelayanan di Kota Kediri.
- e. SWP Probolinggo-Lumajang meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, dengan pusat pelayanan di Kota Probolinggo
- f. SWP Blitar meliputi: meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, dengan pusat pelayanan Kota Blitar.
- g. SWP Jember dan sekitarnya meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Jember.
- h. SWP Banyuwangi meliputi: Kabupaten Banyuwangi, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Banyuwangi.

- i. SWP Madura dan Kepulauan meliputi: Kabupaten Sampang, Pamekasan dan

Kabupaten Sumenep serta pusat pelayanan di Perkotaan Pamekasan. Berdasarkan peraturan presiden terkait dengan adanya wilayah tertinggal yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 - 2019 di Provinsi Jawa Timur terdapat empat kabupaten diantaranya Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Kabupaten Sampang (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). Dua diantara empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai wilayah tertinggal terdapat di SWP Jember dan sekitarnya, dimana terdapat tiga kabupaten di SWP Jember dan sekitarnya yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Terdapat dua kabupaten yang telah ditetapkan sebagai wilayah tertinggal SWP Jember dan sekitarnya tersebut yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo sehingga penelitian difokuskan pada SWP Jember dan sekitarnya.

Identifikasi pertumbuhan ekonomi daerah bisa dikatakan meningkat yaitu jika PDRB naik. Batasan wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengatur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik (Adisasmita, 2011). Pembangunan daerah merupakan bagian dari integrasi pembangunan nasional sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi selain untuk meningkatkan pendapatan nasional maupun daerah tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan nasional tidak dapat terlepas dari peran pemerintah daerah, terutama Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga begitu penting peran pemerintah daerah untuk mengkoordinasi sekaligus memimpin daerahnya, karena jika dipimpin oleh pemerintah pusat saja kondisi dan keperluan setiap daerah berbeda-beda.

Melalui desentralisasi fiskal diharapkan kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat tercermin secara garis besar tercermin dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam pencapaiannya akan terkait dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan, termasuk di dalamnya kebijakan mengenai besaran PAD dan dana perimbangan, untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan evaluasi terkait PAD dan dana perimbangan dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

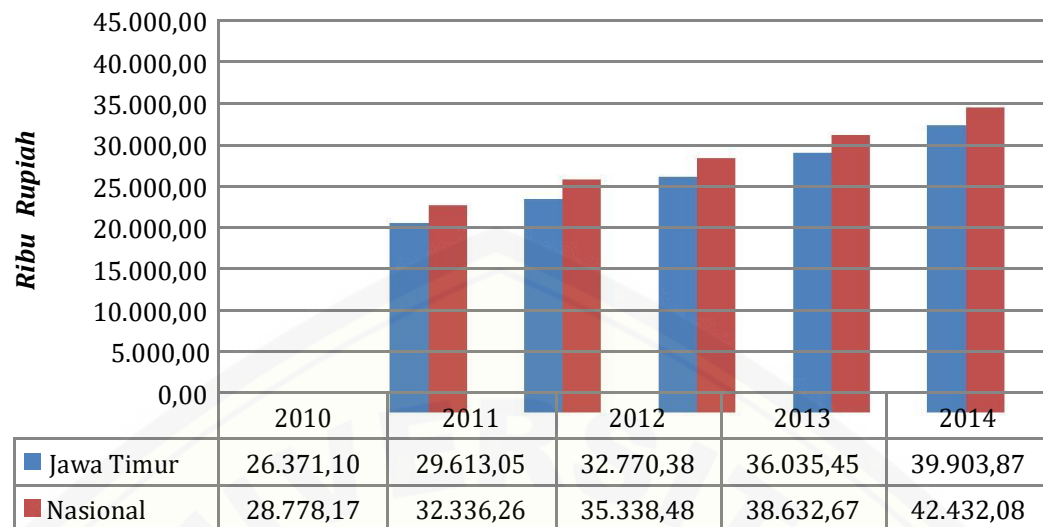


Sumber: BPS, 2014

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010

Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur selama tahun 2011-2014 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 6,3 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,90 persen. Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis di bidang industri karena terletak di antara Jawa Tengah dan Bali sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri dan perdagangan.





Sumber: BPS, 2014

Gambar 1.2 PDRB Per Kapita ADHB

Hal ini menunjukkan kinerja rata-rata Jawa Timur berkembang lebih pesat dari rata-rata provinsi lain. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tentunya untuk SWP Jember dan Sekitarnya juga berpengaruh dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2004) yang menyatakan bahwa, perekonomian yang tinggi disuatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Peningkatan serta tingginya pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat dari perkembangan jumlah rata-rata PDRB menurut Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang di spesifikasikan kepada SWP Jember dan Sekitarnya.

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan pembangunan adalah dengan melihat Produk Domestik Bruto di suatu wilayah / daerah. Pembangunan yang merata maka akan di ikuti dengan pendapatan yang meningkat baik barang

dan jasa yang di produksi. Hal ini dikarenakan Produk Domestik Bruto merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi di suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu mempertimbangkan kepemilikan (Sutarno, 2013 dalam Indiyani,2015).

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2010 – 2014

NO	KAB/ KOTA	2013	2014	NO	KAB/ KOTA	2013	2014
1	Kab. Pacitan	8.153,20	8.577,60	20	Kab. Magetan	9.789,60	10.296,70
2	Kab. Ponorogo	10.557,30	11.114,30	21	Kab. Ngawi	10.203,00	10.775,00
3	Kab. Trenggalek	9.482,20	9.995,10	22	Kab. Bojonegoro	38.993,70	39.912,50
4	Kab. Tulungagung	20.144,40	21.242,10	23	Kab. Tuban	33.836,70	35.611,40
5	Kab. Blitar	18.965,20	19.915,30	24	Kab. Lamongan	19.836,10	21.107,60
6	Kab. Kediri	21.824,10	22.980,60	25	Kab. Gresik	71.304,50	76.340,40
7	Kab. Malang	49.711,40	52.546,60	26	Kab. Bangkalan	16.204,00	17.369,80
8	Kab. Lumajang	16.940,50	17.854,70	27	Kab. Sampang	11.622,00	11.629,60
9	Kab. Jember	39.224,50	41.465,50	28	Kab. Pamekasan	8.369,60	8.856,20
10	Kab. Banyuwangi	39.649,90	41.994,20	29	Kab. Sumenep	20.162,80	21.478,40
11	Kab. Bondowoso	10.140,10	10.654,90	30	Kab. Kediri	65.407,00	69.220,00
12	Kab. Situbondo	10.005,30	10.558,50	31	Kab. Blitar	3.445,20	3.648,50
13	Kab. Probolinggo	17.838,20	18.751,80	32	Kab. Malang	37.541,70	39.725,70
14	Kab. Pasuruan	74.928,80	79.905,30	33	Kota Probolinggo	5.911,30	6.261,90
15	Kab. Sidoarjo	99.975,70	106.156,40	34	Kota Pasuruan	4.314,10	4.560,50
16	kab. Mojokerto	41.579,20	44.225,10	35	Kota Mojokerto	3.566,40	3.771,80
17	Kab. Jombang	20.672,30	21.793,20	36	Kota Madiun	7.470,70	7.965,50
18	Kab. Nganjuk	13.473,80	14.161,50	37	Kota Surabaya	286.057,20	305.308,00
19	Kab. Madiun	9.654,10	10.169,70	38	Kota Batu	8.018,00	8.573,40
PDRB JATIM						192.841,90	1.262.700,20

Sumber : BPS Jawa Timur 2010-2014

PDRB di Jawa Timur untuk wilayah Eks Keresidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso) terjadi peningkatan dari tahun 2013-2014, dimana untuk Kabupaten Jember dari 39.224,50 meningkat menjadi 41.465,50. Untuk Kabupaten Banyuwangi dari 39.649,90 meningkat menjadi 41.994,20. Untuk Kabupaten Bondowoso dari 10.140,10 meningkat menjadi 10.654,90. Dan untuk Kabupaten Situbondo dari 10.005,30 meningkat menjadi 10.558,50.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan di daerah tersebut. Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu indikator yang dapat melihat kesejahteraan masyarakat dikarenakan



pendapatan asli daerah tentunya akan sangat bertopang pada pendapatan daerahnya sendiri. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga permasalahan dalam kemiskinan, tidak meratanya pendapatan akan dapat dikurangi dengan adanya pembiayaan yang dilakukan daerah dalam menekan angka tersebut dan harapannya kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.

Pendapatan Asli Daerah dapat menjadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian di suatu daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk menganggarkan belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat di tiap tahunnya. Peningkatan pelayanan publik tentunya akan berdampak pada kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan nantinya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Putra dan Ulupui, 2015).

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah SWP Jember dan Sekitarnya?
- b. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah SWP Jember dan Sekitarnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi di daerah SWP Jember dan Sekitarnya maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di daerah SWP Jember dan Sekitarnya.

- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah SWP Jember dan Sekitarnya.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak terkait sehingga memiliki manfaat yaitu :

- a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagaimana pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah SWP Jember dan Sekitarnya dan aplikasi terhadap teori yang diperoleh peneliti dengan fenomena ekonomi yang sebenarnya.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masalah pemerintah dalam menyejahterahkan masyarakatnya, dan juga dapat dijadikan masukan guna memberikan kebijakan yang tepat sasaran.

- c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini upaya penulis untuk mengembangkan pengetahuan di bidang ekonomi terkait peningkatan Produk Domestik Regional Bruto SWP Jember dan Sekitarnya dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara (Mirza, 2012). Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, maka semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi dan hal itu nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya pembangunan mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem tersebut. Pembangunan seharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2009).

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah adalah proses kerja antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses pembangunan yang terjadi antara kota dan desa yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di

antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sistem modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap urbanisasi yang ada (Kuncoro, 1997).

Jhingan dalam Septian (2015) mengemukakan berbagai syarat-syarat pembangunan ekonomi yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumbuh pada kemampuan perkenomian dalam negeri atau daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakat.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, ketidaksempurnaan pasar menyebabkan *immobilitas* faktor dan menghambat ekspansi sectoral dan pembangunan.
3. Perubahan *structural*, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai dengan meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
4. Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi dan diartikan sebagai kunci utama untuk menuju pembangunan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perkenomian.
6. Persyaratan sosio-budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
7. Administrasi sebagai alat perlengkapan administrasi untuk perencanaan ekonomi pembangunan.

Todaro dan Smith (2011) menyatakan pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut :

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.

- 2) Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemiskinan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- 3) Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Menurut Rostow dalam Arsyad (1988) pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multi-dimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

### **2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah**

Dalam teori makroekonomi, Dumaury (1997) menyatakan bahwa identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan merubah pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja tidaklah cukup, tetapi harus diperhitungkan siapa atau masyarakat lapisan mana yang akan meningkat pendapatannya atau kesejahteraannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. Teori mengenai



pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro sebagai berikut

#### 1. Teori Makro

Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

##### a) Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. (Basri, 2005)

Pada tingkat yang lebih lanjut, Rostow dalam Mangkoesoebroto (2010) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti

halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. (Mangkoesobroto, 1994)

b) Teori Adolf Wagner

Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB (Dumairy, 1997).

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut: (Mangkoesobroto, 2010)

$$\frac{PPkP < PkPPn < .. < PkPPn}{PPK1 \ PPK2 \ PPKn}$$

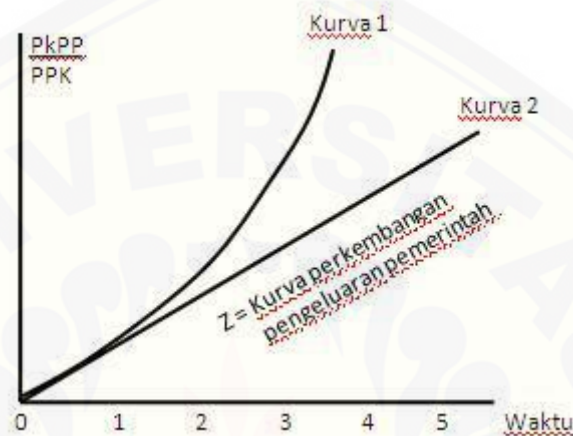


Dimana:

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)



Sumber: Mangkoesobroto, 2010

Gambar 2.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

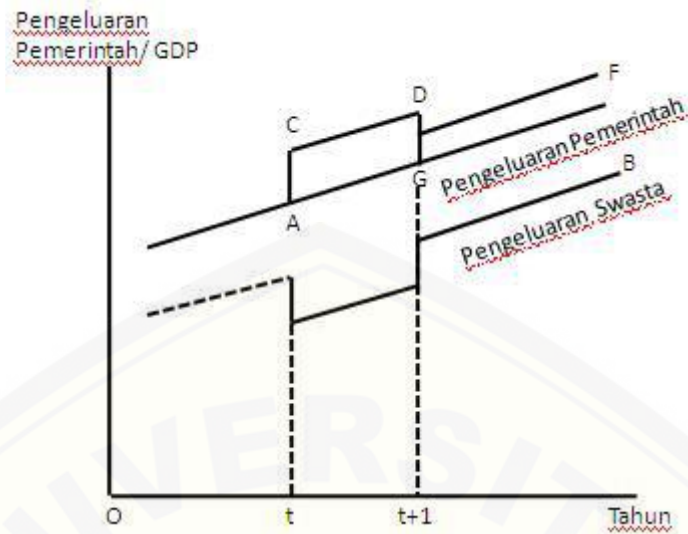
Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

#### a. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa

masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena (Mangkoesoebroto, 2010).

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga (Mangkoesoebroto, 1991). Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:



Sumber: Mangkoesobroto, 2010

Gambar 2.2 Pengeluaran Pemerintah Terhadap GNP

Keadaan normal,  $t$  ke  $t+1$ , pengeluaran pemerintah dalam persentaseterhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun  $t$  terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun  $t+1$ , pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

## 2. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro menurut Mangkoesobroto (2010)mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

## a. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

Dimana:

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan  $i$  barang K sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

## b. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S)$$

Dimana:

$U_p$  = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan

G = vector barang public

X = vector barang swasta

Dan di asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih :

$$\text{Max } U_i = f(X, G)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya :

$$P_x X + t B < M_i$$

Dimana:

$P$  = vektor harga barang swasta

$X$  = vektor barang swasta

$B_i$  = basis pajak individu 1

$M_i$  = total pendapatan individu 1

$T$  = tariff pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*PriceTaker*). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

### 2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

#### 1) Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (1997) masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Dalam pertumbuhan output, Adam Smith melihat system produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: Sumber alam yang tersedia, sumber manusia, dan stok barang kapital yang ada. Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi.

Teori ini juga menjelaskan di dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikan ke sektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya. Perlu dicatat bahwa akumulasi modal dan investasi sangat



bergantung pada perilaku menabung masyarakat, sementara di sisi lain kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber-sumber yang ada. Artinya bahwa orang yang mampu menabung pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang menguasai dan mengolah sumber-sumber ekonomi, yaitu para pengusaha dan tuan tanah. Pekerja merupakan satu-satunya pelaku ekonomi yang tidak memiliki kemampuan menabung karena mereka tidak mampu menguasai dan mengolah sumber-sumber ekonomi yang ada.

## 2) Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Pertumbuhan ekonomi menurut Neo Klasik dalam Arsyad (1988) pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengangguran penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Teori pertumbuhan Neo Klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya mereka didasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh *Charles Cobb* dan *Paul Douglas* yang sekarang dikenal dengan sebutan *fungsi produksi Cobb-Douglas*.

Fungsi tersebut bisa dituliskan dengan cara berikut :

$$Q_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

Dimana :

$Q_t$  = tingkat produksi pada tahun t

$T_t$  = tingkat teknologi pada tahun t

$K_t$  = jumlah stok barang modal pada tahun t

$L_t$  = jumlah tenaga kerja pada tahun t



- $\alpha$  = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal  
 $\beta$  = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Nilai  $T$ ,  $\alpha$  dan  $\beta$  bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai  $\alpha$  dan  $\beta$  ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa  $\alpha + \beta = 1$ , yang berarti bahwa  $\alpha$  dan  $\beta$  nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai  $\alpha$  dan  $\beta$  ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

### 3) Teori Pertumbuhan (Solow-Swan)

Teori ini memandang bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat digunakan sepanjang waktu. Sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja dan perubahan dalam produktivitas. Perbedaan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara, sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi. Dengan mengasumsikan suatu tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model pertumbuhan Solow-Swan dapat menghasilkan berapa tingkat pendapatan perkapita suatu negara. Bentuk fungsi produksi dalam model pertumbuhan Solow adalah:

$$Q = f(K, L); K, L > 0$$

Pada persamaan di atas  $Q$  adalah output bersih sesudah depresiasi,  $K$  adalah modal, dan  $L$  adalah tenaga kerja. Model pertumbuhan ini selanjutnya disebut dengan model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Dalam model pertumbuhan endogen ini dicari variabel yang dapat dimasukkan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Salah satu variabel yang dianggap dapat ikut menjelaskan pertumbuhan dari suatu ekonomi adalah variabel sumber daya manusia. Pada tahap selanjutnya Solow berusaha memasukkan variabel perubahan teknologi dalam model pertumbuhan. Variabel perubahan teknologi ini menggambarkan kondisi pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, dimana saat teknologi berkembang maka tingkat efisiensi tenaga kerja juga akan naik. Dengan adanya kemajuan teknologi, model Solow akhirnya

bisamenjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang dialami oleh berbagai Negara. Model Solow menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi *steady-state* dicapai. Dengan penambahan variabel baru ini maka persamaan awal dari Solow berubah menjadi:

$$Y = f(K, L \times E)$$

Pada persamaan di atas E adalah variabel baru dari teknologi yang selanjutnya disebut dengan efisiensi tenaga kerja, sedangkan  $L \times E$  menunjukkan jumlah tenaga kerja yang efektif. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa jumlah output (Y) adalah tergantung pada jumlah unit modal (K) dan jumlah pekerja yang efektif ( $L \times E$ ).

#### 4) Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow (1997) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:

- a. Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan dan sikap yang masih primitif, dan berfikir irasional.
- b. Prasyarat lepas landas, adalah suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*selfsustained growth*).
- c. Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru.
- d. Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.

- e. Masyarakat berkonsumsi tinggi, adalah suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

Banyak ahli ekonomi telah mendefinisikan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah Sukirno (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Pada konteks regional, yaitu dengan memasukkan unsur lokasi/wilayah dalam pembahasannya, pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Indikator pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara yang lazim dipakai adalah Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Sementara indikator pertumbuhan ekonomi daerah atau regional dari suatu negara adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai cermin dari pendapatan regional.

PDRB dapat dihitung menggunakan 2 metode yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan PDRB atas dasar harga berlaku adalah pendekatan yang menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi pada satu wilayah pada tahun tertentu dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah pendekatan yang menghitung besaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi seluruh unit ekonomi pada tahun tertentu dengan menggunakan harga pada tahun yang dijadikan sebagai tahun dasar. Untuk penelitian ini, kami menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi yang terjadi di suatu daerah.

##### 5) Teori Pertumbuhan Baru

Teori pertumbuhan baru menganalisis tentang pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari system ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal

lebih besar dari hanya sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh akan hanya modal fisik saja melainkan modal manusia. Akumulasi modal juga merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006).

Teori ini mengasumsikan juga bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal dan memacu peningkatan produktivitas (Todaro, 2000). Dengan kata lain peranan pemerintah dibutuhkan dalam pembangunan modal manusia untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam teori pertumbuhan baru ini terdapat persamaan sederhana yaitu (Utama, 2015) :

$$Y = AK$$

Dalam rumus ini A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi sedangkan K melembangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Dalam rumusan ini ditekankan adanya kemungkinan bahwa investasi modal fisik dan manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal yang positif dan peningkatan produktivitas (Todaro, 2000). Realitanya dengan melakukan investasi dalam bidang pendidikan akan dapat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga semakin meningkat dan akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya (Saputra, 2011 dalam Utama, 2015).

#### **2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Perekonomian di suatu wilayah dikatakan tumbuh dan berkembang jika barang dan jasa yang di produksi pada periode ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang kemudian diturunkan menjadi nilai tambah.

Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui prosentasi perkembangan pendapatan riil. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan



ekonomi berarti perkembangan fiskal produk barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produk barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produk sektor jasa dan pertumbuhan produk dalam modal (Sukirno,2011).

Profesor Kuznet menyatakan salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output perkapita(Todaro,1997 dalam Alif, 2015). Pertumbuhan ekonomi perkapita yang dimaksud adalah PDRB, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan konsumsi dalam hal tingkat daya beli masyarakat. Artinya, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan output perkapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Produk domestik regional bruto adalah jumlah seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, sedangkan yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi atau output yang dihasilkan dan dikurangi biaya antara (Tarigan, 2005). Produk domestik regional bruto yang dihasilkan di setiap daerah besar nya berbeda– beda, hal ini tergantung oleh potensi atau faktor – faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan juga kemampuan daerah untuk mengelolah potensi atau faktor–faktor produksi yang dimiliki oleh masing – masing.

Cara perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu (BPS,2012) :

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (katagori) :

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
2. Pertambangan dan penggalihan
3. Industri pengolahan

4. Pengadaan Listrik, Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Komunikasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan; pertahanan dan jaminan sosial wajib
15. Jasa – jasa Pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Jasa lainnya.

b. Pendekatan pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

1. Pengeluaran konsumsi dan rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto
4. Perubahan inventori
5. Ekspor *netto*

c. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto di susun dalam dua bentuk yaitu :

- 1) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan merupakan jumlah nilai produksi pengeluaran atau pendapatan yang di hitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinsikan berdasarkan harga – harga pada



tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto Rillnya.

- 2) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berkaju menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perkeonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atau ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

#### **2.1.5 Desentralisasi Fiskal**

Dalam UU No.33 tahun 2004 yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Undang – Undang Republik No. 33 tahun 2004 menimbang bahwa pembangunan nasional yang dilakukan merupakan upaya pembangunan yang bereksinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Adisasmita (2011) Tujuan pelaksanaan otonomi daerah, sesuai undang – undang No. 29 / 1999 adalah upaya memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan desentralisasi desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan ini merupakan mengubah penyelenggaraan pemerintah dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kecuali

politik luar negeri, pertahanan, ke amanan, peradilan, agama, fiskal, monoter, dan kewenangan lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (RPJMN, 2005).

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal ini maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik diharapkan menjadi sederhana dan cepat dikarenakan dilakukan oleh pemerintah terdekat sesuai kewenangan yang ada.

Tujuan pokok dilakukannya desentralisasi yang terdapat dalam Undang – Undang No 25 tahun 1999 (Adisasmita,2011) yaitu :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akutanbel) dan pasti.
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah bersangkutan.
- d. Menjadi aman dalam alokasi penerimaan negara bagi negara.
- e. Mempertegas sistem pertanggung jawaban pemerintah daerah.
- f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah

#### **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Menurut Halim Abdul (2004), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari berikut ini.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- b. Penerimaan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasila daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lainlain PAD yang sah yaitu sebagai berikut.
- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b) Jasa giro
  - c) Pendapatan bunga
  - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

## 2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## 3) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung

pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

#### 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan meliputi :

##### a. Pemberdayaan

Peningkatan dan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesehatan termasuk aparatur, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan kepercayaan dan peluang dalam masyarakat dan dunia usaha untuk merealisasikan aspirasi dan harapan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan kesehatan

##### b. Kemitraan.

Kerja sama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian, dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan

##### c. Partisipasi

Prakarsa, peran aktif, dan keterlibatan semua pelaku pembangunan kesehatan termasuk penyedia dan penerima layanan kesehatan serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan.

#### **2.1.7 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka



pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. pengembangan ekonomi lokal. Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut :

#### 1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP). Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Penerimaan yang di bagi hasilkan terdiri atas :

##### 1. Penerimaan Pajak :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. PPh Orang Pribadi

##### 2. Penerimaan Bukan Pajak :

- a. Sektor Kehutanan
- b. Sektor Pertambangan Umum
- c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
- d. Sektor Perikanan

#### 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,

khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara pemerintah daerah. Secara definisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang mengalokasikan didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal
- b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah
- c. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menentralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah.

### 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

#### 4) Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat.

#### 5) Lain-lain pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Kajian
----	----------	------------------	---------------	--------------

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Kajian
1	Rivar Ubar Harahap (2011)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara	Metode Purposive Sampling	Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap IPM. Secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Dan memiliki sektor-sektor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ialah sektor yang mengurangi kesenjangan yaitu sektor perdagangan, tenaga kerja dan industri. Sedangkan Sektor-sektor infrastruktur memiliki pengaruh langsung relatif kecil terhadap peningkatan IPM.
2	Anis Setyawati (2007)	Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur	Statistik Deskriptif Dan Regresi Linier Berganda	Hasil pengujian secara langsung dengan regresi berganda menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil pengujian secara tidak langsung PAD terhadap kemiskinan adalah sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%, sedangkan DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Kajian
				8,6%.
3	Febrian Dwi Prakarsa (2014)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)	Metode Analisa Deskriptif Kuantitatif, Data Panel	<p>1. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Variabel bebas yang kedua dalam regresi ini yaitu Belanja Barang dan Jasa (BBJ) yang dalam regresi ini terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.</p> <p>3. Variabel Belanja Modal mempunyai hubungan yang signifikan walaupun bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah dalam Belanja Modal yang di lakukan oleh</p>



No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Kajian
				beberapa Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah akan mengurangi tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah itu sendiri.
4	Asmaul Husna, SE., Ak., MM dan Myrna Sofia, SE., M.Si (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	Data Sekunder Runtun Waktu (Time Series)	Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan</li> <li>2. Lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan</li> <li>3. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan</li> <li>4. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan</li> <li>5. Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan</li> </ol>
5	Hastu Sarkoro (2016)	Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Kuantitatif Dengan Menggunakan Data Sekunderpurposive Sampling	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan secara parsial bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu Belanja Daerah dan hipotesis keempat (H4) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H1

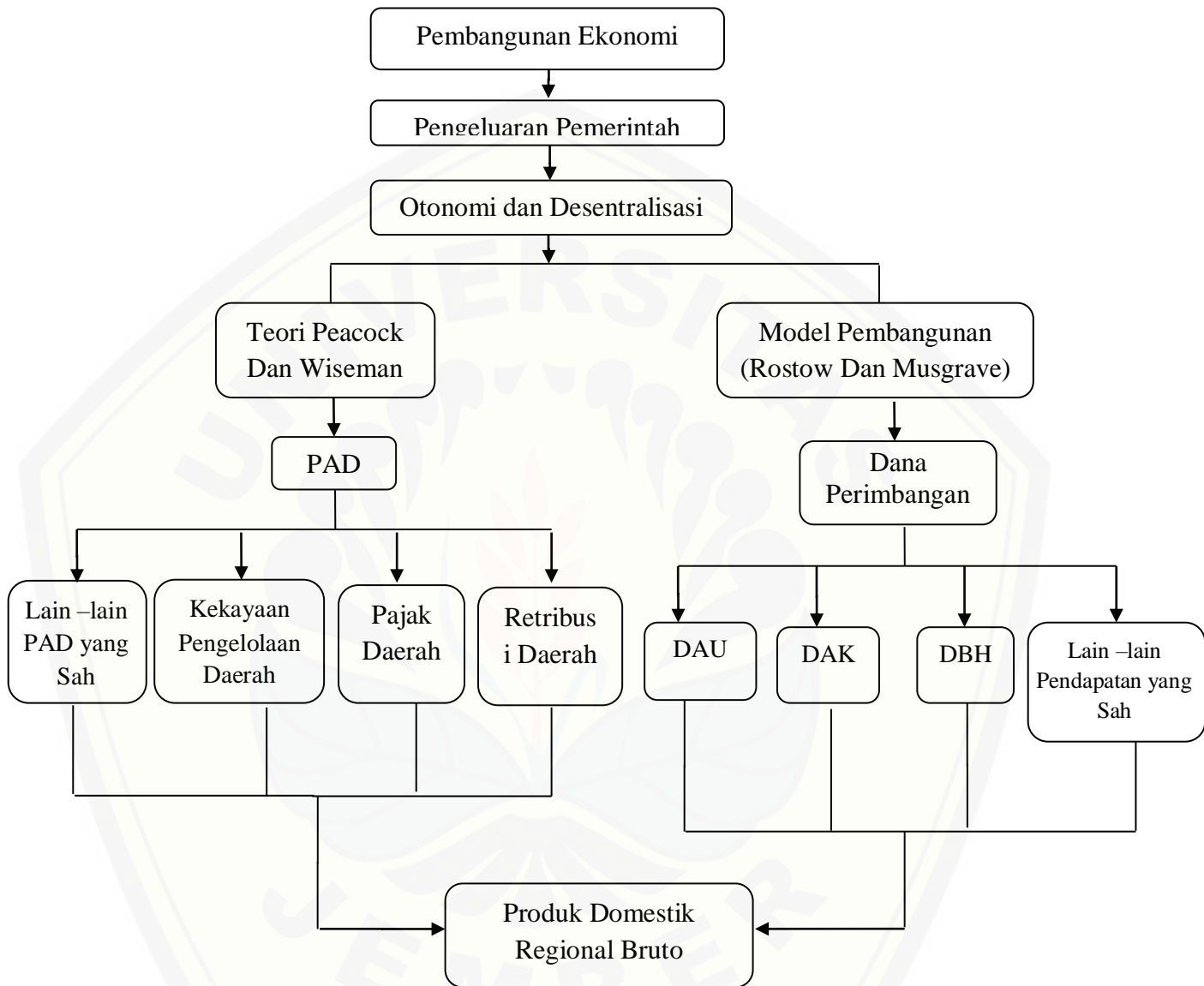
No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Kajian
				<p>dan H4 diterima. Sedangkan, hipotesis kedua (H2) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan hipotesis ketiga (H3) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H2 dan H3 ditolak. Sedangkan, secara simultan bahwa Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>
6	Nurul Widyasari (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil(Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Alokasi Khusus (Dak)Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pdrb)(Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)	Analisis Statistik Menggunakan SPSS 16.0.	<p>Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-babsebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> <li>2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil (DBH)berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> <li>3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umumberpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> <li>4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> </ol>

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau suatu dugaan, anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang bisa penulis kemukakan sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto
- b) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto
- c) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto
- d) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangadji dan Sopiah, 2010). Menurut Soewadji (2012) Tujuan dari penelitian Deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Wirat Maja (2014) mengatakan jenis penelitian kuantitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistic atau cara lain dari ini adalah gabungan antara data subjek dan data dokumenter (*Documentary Data*). Data dokumentasi yang digunakan yaitu data-data mengenai pajak restoran Jember, data yang berupa angka-angka atau yang berhubungan dengan laporan keuangan.

##### **3.1.2 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan badan pusat statistik (BPS Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso) khususnya data tahun 2003 hingga tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan produk domestik regional bruto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Panel yaitu data yang merupakan dari data *time series* dan *cross section*. Diambil dari data time series pada periode tahun 2003 –



2012, sedangkan data cross section adalah 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo.

## 3.2 Metode Analisis

### 3.2.1 Analisis Data panel

Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan waktu, yang merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Dengan kata lain data panel adalah data yang diperoleh dari cross section yang diobservasi berulang pada unit individu yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu. Apabila setiap unit cross section memiliki jumlah observasi times series yang sama maka disebut sebagai *balanced panel*. Sebaliknya jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit cross section maka disebut *unbalanced panel*.

Terdapat tiga tehnik pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data yaitu (Mirza, 2012) :

- 1) Pendekatan Model Pooled Least Square (*Common Effect*). Model ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu tehnik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan Metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.
- 2) Pendekatan Model Efek Tetap (*Fixed Effect*). Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebuta model efek tetap atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga *Covariance*

*Model*. Pada metode ini estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobot (*Cross – Section Weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross – section. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing – masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintreprestasi data. Pemilihan model *Common Effect* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan *Fixed Effect Model*.

- 3) Pendekatan Model Efek Acak (*Random Effect*). Model data dengan pendekatan ini yaitu model efek acak yang parameter – parameternya berbeda antar daerah maupun antar waktu yang dimasukkan ke dalam error. Dengan menggunakan model pendekatan ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan menggunakan model efek tetap maupun efek acak dapat ditentukan dengan menggunakan uji *Hausman* dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap atau pun acak ditentukan dengan menggunakan uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan menggunakan model efek tetap atau pun acak ditentukan dengan menggunakan uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Perumusan model penelitian ini sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam model persamaan pada judul "ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI DAERAH SWP JEMBER DAN SEKITARNYA". Mencermati judul tersebut maka penelitian tersebut menggunakan data panel dan jenis data tahunan. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + e_{it}$$

Dimana:

$PDRB_{it}$  = Pertumbuhan ekonomi

$PAD_{it}$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$DAU_{it}$  = Dana Alokasi Umum (DAU)

$DAK_{it}$  = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$DBH_{it}$  = Dana Bagi Hasil (DBH)

$\beta_0$  = Konstanta (besarnya Y apabila  $X_1, X_2$  dianggap konstan)

$\beta_1$  = Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

$\beta_2$  = Besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto

$\beta_3$  = Besarnya pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto

$\beta_4$  = Besarnya pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Produk Domestik Regional Bruto

$e_{it}$  = Variabel pengganggu

I = kabupaten/kota di daerah SWP Jember dan Sekitarnya

T = waktu (tahun)

Regresi dengan data panel, secara umum mengakibatkan adanya kesulitan dalam spesifikasi model. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu *residual time series*, *cross section* maupun gabungan keduanya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan panel data. Penaksiran model data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *fixed effect* dan pendekatan *random effect*.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it}$$

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

### 3.2.2 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara serentak (Uji-F), uji parsial (Uji-t) dan koefisien determinasi berganda (adjusted R-square).

#### 1. Uji F (Pengujian Secara Bersama – Sama)

uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah SWP Jember dan Sekitarnya.

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - 1)}$$

Dimana :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

k = Jumlah Variabel Bebas

n = Jumlah Sampel

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- a.  $H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 0$ , Berarti seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
- b.  $H_a = b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ , Berarti seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Kriteria Pengujian :

- 1) Jika nilai F hitung  $\leq$  nilai F Tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- 2) Jika nilai F hitung  $>$  nilai F Tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima .

## 2. Uji t (Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah uji variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b}{sb}$$

Dimana :

$\beta_1$  = Koefesien Regresi

$S\beta_1$  = Standard Error

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

### a. Pendapatan Asli daerah

- 1)  $H_0 = b_1 = 0$ , artinya variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
- 2)  $H_a = b_1 \neq 0$ , artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

### b. Dana Alokasi Umum (DAU)

- 1)  $H_0 = b_2 = 0$ , artinya variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
- 2)  $H_a = b_2 \neq 0$ , artinya variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

### c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- 1)  $H_0 = b_3 = 0$ , artinya variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.



2)  $H_a = b_3 \neq 0$ , artinya variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

d. Dana Bagi Hasil (DBH)

1)  $H_0 = b_4 = 0$ , artinya variabel DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

2)  $H_a = b_4 \neq 0$ , artinya variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Kriteria pengambilan keputusan:

a) Jika probabilitas t hitung  $\leq \alpha$  (0.05), di mana  $\alpha$  merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

b) Jika probabilitas t hitung  $> \alpha$  (0.05), di mana  $\alpha$  merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

3. Koefisien Determinasi (adjusted R-square)

Adjusted  $R^2$  adalah uji statistik yang melihat seberapa besar total variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Disini adjusted R-square lebih untung digunakan dalam penelitian dikarenakan dalam uji R-square variabel keseluruhan yang diuji.

$$\text{adjusted R-square} = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana :

adjusted  $R^2$  = Koefisien Determinasi

ESS = Jumlah Kuadrat yang Dijelaskan

TSS = Jumlah Kuadrat Total

### 3.2.3 Uji Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksiran. Disamping itu suatu model

dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksikan apabila sudah lolos dari uji asumsi klasik yang mendasarinya. Karena uji asumsi klasik terdapat metode *BLUE (Best Linier Unbiased Estimators)*, maka dalam uji ini merupakan uji ekonometrika yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas.

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya satu atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. Ada rules of thumb bahwa suatu model mengandung masalah multikolinieritas apabila model tersebut memiliki  $R^2$  tinggi (misal diatas 0,8), tetapi tingkat signifikan variabel-variabel penjelas berdasarkan uji t statistik sangat sedikit. Cara paling mudah untuk mengatasi masalah multikolinieritas adalah menghilangkan/mendrop satu atau beberapa variabel yang memiliki korelasi tinggi dalam model regresi, cara lain bisa dengan menambah data penelitian, cara ini bermanfaat jika masalah multikolinieritas akibat kesalahan sampel (Purwanto dan Sulistyastuti, 2007)

b. Uji Heterokedastisitas

Terjadi apabila variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Heteroskedastisitas cenderung menyerang model empiris yang menggunakan data cross section dari pada data time series. Hal ini terjadi karena perilaku data time series fluktuasinya dari waktu ke waktu relatif stabil. Konsekuensinya adanya gejala heteroskedastisitas adalah estimator tidak lagi mempunyai varian yang minimum yang berakibat perhitungan standar error metode OLS tidak bisa dipercaya lagi kebenarannya, uji-t dan uji-F tidak bisa dipercaya lagi untuk uji model regresi (Gujarati, 2013).

c. Uji autokolerasi

Istilah uji autokolerasi merupakan korelasi antara seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (cross – section), atau korelasi pada dirinya sendiri

(Supranto, 2004). Uji asumsi autokorelasi juga bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t - 1$ . Konsekuensi dari adanya korelasi antara lain adalah:

- 1) Estimator OLS tidak efisien dan test signifikan menjadi tidak valid lagi.
- 2) Uji  $t$  atau uji  $F$  menjadi tidak valid, sehingga kesimpulan menjadi bias.
- 3) Estimator OLS akan sensitif terhadap fluktuasi sampling.

Pengujian disini dapat dilakukan dengan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation* LM. Uji BG-LM digunakan untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada first order tetapi bisa juga digunakan pada order lainnya (Gujarati, 2013).

Kriteria pengujian:

- 1) Apabila nilai probabilitas  $\chi^2$  hitung  $\leq$  nilai probabilitas ( $\alpha = 5\%$ ), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi ditolak.
- 2) Apabila nilai probabilitas  $\chi^2$  hitung  $\geq$  nilai probabilitas ( $\alpha = 5\%$ ), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi diterima.

d. Uji Normalitas

Kenormalan dari variabel pengganggu dapat diamati dengan melakukan uji Jarque Berra LM (Gujarati, 2013) Variabel pengganggu memiliki distribusi normal, sehingga uji  $t$  dan  $F$  dapat dilakukan. Namun apabila asumsi normalitas tidak dapat terpenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan uji  $t$  dan  $F$ , hanya dapat dilakukan dengan konteks asumsi asimtorik. Kenormalan diuji kebenaran atas keadaan normalitas harus dipenuhi dengan hubungannya dan keabsahannya yang dilakukan Uji  $t$  dan Uji  $F$ .

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional adalah variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk menghindari meluasnya permasalahan atau untuk menghindari terjadinya salah tafsir sehingga di perlukan batasan – batasan masalah sebagai berikut :

- a. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.
- b. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebageian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
- c. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP). Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
- d. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

- e. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.





## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi data panel atas Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB SWP Jember dan Sekitarnya tahun 2003-2012 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka PDRB semakin meningkat.
2. Hasil pengujian regresi data panel atas Dana Alokasi Umum terhadap PDRB di SWP Jember dan Sekitarnya tahun 2003-2012 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka PDRB semakin meningkat.
3. Hasil pengujian regresi data panel atas Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB di SWP Jember dan Sekitarnya tahun 2003-2012 menunjukkan hubungan yang signifikan. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka PDRB akan mengalami perubahan.
4. Hasil pengujian regresi data panel atas Dana Bagi Hasil terhadap PDRB di SWP Jember dan Sekitarnya tahun 2003-2012 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil maka PDRB tidak akan meningkat.

### 5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap PDRB SWP Jember dan Sekitarnya sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu menambah variabel-variabel lain yang dimungkinkan relevan dengan PDRB seperti variabel non keuangan (kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan sebagainya).

2. Penggunaan data dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang dan terbaru sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.
3. Pemerintah daerah di setiap wilayah perlu menata penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kearah kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan upaya memperbaiki perekonomian daerah. Sehingga perekonomian daerah dapat menjadi baik maka PDRB juga akan meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R.2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah: Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, L. 1988. *Ekonomi Pembangunan: Edisi Pertama*.Yogyakarta: YKPN.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2015.*RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014–2018*. Bapenda Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2012. *PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2011*.Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Dumairy, 1997.*Perekonomian Indonesia*.Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gujarati, D.N dan Porter, D.C. 2013 *Dasar-Dasar Ekonometrika: Edisi ke Lima*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah: Edisi revisi*. Yogyakarta: YKPN.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: YKPN
- Mangkoesoebroto, G. 1991. *Ekonomi Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkoesoebroto, G. 2010. *Ekonomi Publik: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw,G. 2006. *Makro Ekonomi: Edisi Keenam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mirza, S. 2012.Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Jurnal Analisis Pembangunan Manusia*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 1(4): 135-143
- Priambodo, A. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.*Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 8 (1): 43-45
- Putra, M.G.P dan Ulupui, I.G.K.A. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.*E-jurnal Akutansi*. Fakultas Ekonomi Univesitas Udayana. 22 (1) :3-12
- S, Ginting, K.S, Lubis Irsad, dan Mahali Kasyaful. 2008. Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya.*Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*.4(1):1-8

- Sangadji, E.M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sasana, H. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi dan Manajemen*. 25 (1): 1-8
- Singarimbun, dan Effendi Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Todaro, M.P. dan S.C. Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi. Edisi ke Sebelas Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Utama, Jefri.S. 2015. Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus: Eks Karasedinan Besuki). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## LAMPIRAN

## Lampiran A. Rekapitulasi Data

TAHUN	KABUPATEN	PDRB	PAD	DBH	DAU	DAK
2003	JEMBER	7473.4	37529270	5446786 0	456800000	1000000
2004	JEMBER	7821.29	38489750	1930000 0	472427000	5000000
2005	JEMBER	8236.28	51472720	3660163 1	500843000	6000000
2006	JEMBER	9182	67348261	4375405 1	770394000	1548000 0
2007	JEMBER	9731	77000265	5321356 5	861126000	6622280 0
2008	JEMBER	10319	13647879 9	5702733 0	942532809	6648500 0
2009	JEMBER	10892	10880834 8	6201554 5	940413330	7462100 0
2010	JEMBER	11551	15380203 8	8065855 1	955007373	8775290 0
2011	JEMBER	12360	18279734 0	8277276 7	105864847 2	9959720 0
2012	JEMBER	13251	25580461 1	8948350 5	127929576 4	9536474 0
2003	BONDOWOSO	1604.26	21172049	1239774 6	234020000	1000000
2004	BONDOWOSO	1684.86	23761574	8890965	251718000	2000000
2005	BONDOWOSO	1772.84	20778927	1576734 7	251718000	4000000
2006	BONDOWOSO	2553	23570350	2036936 2	362750000	1061000 0
2007	BONDOWOSO	2694	30069867	2458267 6	397430000	3656100 0
2008	BONDOWOSO	2837	35371878	2618575 8	447561068	4518700 0
2009	BONDOWOSO	2979	30356230	3325582 7	455450603	4404700 0
2010	BONDOWOSO	3147	49663941	4226173 0	479819794	5815130 0
2011	BONDOWOSO	3342	66816392	4502975 8	539918142	6693600 0
2012	BONDOWOSO	3558	77846177	4574121 8	666857212	6541778 0
2003	SITUBONDO	2468.6	16091276	2325338	203560000	5000000



				5		
2004	SITUBONDO	2573.13	12112354	1231364 8	206730000	1203000 0
2005	SITUBONDO	2703.99	24145555	1968458 2	221834000	1373000 0
2006	SITUBONDO	2852	17592681	4465395	364404000	2735000 0
2007	SITUBONDO	3013	29481682	3194374 2	383831000	3768300 0
2008	SITUBONDO	3167	31351950	3165087 4	427846472	4778400 0
2009	SITUBONDO	3330	32017677	3188645 1	433451330	6079200 0
2010	SITUBONDO	3522	46615899	3552294 0	447609618	3996720 0
2011	SITUBONDO	3744	61761290	3371116 5	515752127	6094230 0
2012	SITUBONDO	3989	67050481	3719222 3	616093730	6671840 0
	Rata-rata	9536	60905321	3718005 3	538194761	4078102 0

**Lampiran B. Uji Hausman**

Uji Chow → *Fixed effect*

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	175.032666	(2,23)	0.0000
Cross-section Chi-square	83.587780	2	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/15/18 Time: 14:27  
Sample: 2003 2012  
Periods included: 10  
Cross-sections included: 3  
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3922.684	764.7218	-5.129557	0.0001
X1	-1.55E-05	1.08E-05	-1.432134	0.1714
X2	1.59E-05	2.60E-06	6.142479	0.0000
X3	-2.07E-06	2.01E-05	-0.103120	0.9191
X4	4.42E-05	2.69E-05	1.644818	0.1195
R-squared	0.924020	Mean dependent var	5278.233	
Adjusted R-squared	0.911864	S.D. dependent var	3660.685	
S.E. of regression	1086.775	Akaike info criterion	16.97083	
Sum squared resid	29527012	Schwarz criterion	17.20436	
Log likelihood	-249.5624	Hannan-Quinn criter.	17.04554	
F-statistic	76.00895	Durbin-Watson stat	1.281337	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman → *Fixed Effect*

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	31.842524	4	0.0000

Period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.000015	-0.000004	0.000000	0.1344
X2	0.000016	0.000014	0.000000	0.3779
X3	-0.000002	-0.000063	0.000000	0.0009
X4	0.000044	0.000056	0.000000	0.5397

Period random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/15/18 Time: 14:28

Sample: 2003 2012

Periods included: 10

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1653.653	620.5617	-2.664768	0.0133
X1	5.64E-05	2.52E-05	2.240161	0.0342
X2	1.43E-05	2.45E-06	5.829029	0.0000
X3	-6.34E-05	1.08E-05	-5.891763	0.0000
X4	-4.45E-06	1.10E-05	-0.403868	0.6897

#### Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.974946	Mean dependent var	5278.233
Adjusted R-squared	0.954590	S.D. dependent var	3660.685
S.E. of regression	780.0756	Akaike info criterion	16.46138
Sum squared resid	9736286.	Schwarz criterion	17.11528
Log likelihood	-232.9207	Hannan-Quinn criter.	16.67057
F-statistic	47.89462	Durbin-Watson stat	0.599195
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Lampiran C. Regresi Data Panel**Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/15/18 Time: 14:29  
 Sample: 2003 2012  
 Periods included: 10  
 Cross-sections included: 3  
 Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1653.653	620.5617	-2.664768	0.0133
X1	5.64E-05	2.52E-05	2.240161	0.0342
X2	1.43E-05	2.45E-06	5.829029	0.0000
X3	-6.34E-05	1.08E-05	-5.891763	0.0000
X4	-4.45E-06	1.10E-05	-0.403868	0.6897

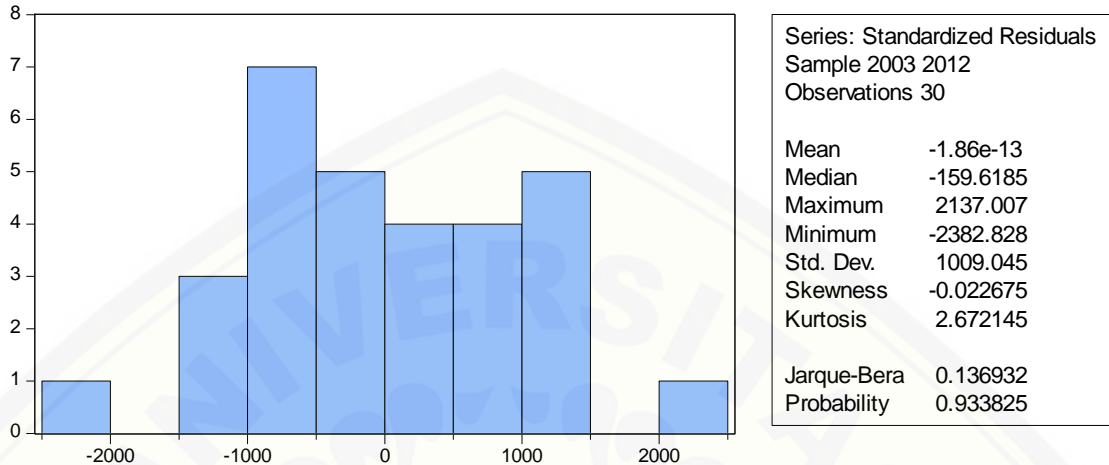
## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995316	Mean dependent var	5278.233
Adjusted R-squared	0.994094	S.D. dependent var	3660.685
S.E. of regression	281.3308	Akaike info criterion	14.31790
Sum squared resid	1820382.	Schwarz criterion	14.64485
Log likelihood	-207.7685	Hannan-Quinn criter.	14.42250
F-statistic	814.5124	Durbin-Watson stat	1.269537
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Lampiran D. Uji Asumsi Klasik**

Uji Normalitas



Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: REABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/15/18 Time: 14:35  
 Sample: 2003 2012  
 Periods included: 10  
 Cross-sections included: 3  
 Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	672.2311	321.2321	2.092665	0.0467
X1	3.54E-06	5.70E-06	0.621201	0.5401
X2	1.25E-06	1.27E-06	0.988067	0.3326
X3	-4.69E-06	5.57E-06	-0.840641	0.4085
X4	-1.47E-05	1.30E-05	-1.128237	0.2699

R-squared	0.135204	Mean dependent var	824.1765
Adjusted R-squared	-0.003163	S.D. dependent var	561.6786
S.E. of regression	562.5663	Akaike info criterion	15.65391
Sum squared resid	7912021.	Schwarz criterion	15.88744
Log likelihood	-229.8086	Hannan-Quinn criter.	15.72862
F-statistic	0.977138	Durbin-Watson stat	1.682536
Prob(F-statistic)	0.437705		



## Uji Multikolinearitas

Variabel	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.838394	0.759076	0.804063
X2	0.838394	1.000000	0.787966	0.818188
X3	0.759076	0.787966	1.000000	0.771263
X4	0.804063	0.818188	0.771263	1.000000

## Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/15/18 Time: 14:29  
 Sample: 2003 2012  
 Periods included: 10  
 Cross-sections included: 3  
 Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1653.653	620.5617	-2.664768	0.0133
X1	5.64E-05	2.52E-05	2.240161	0.0342
X2	1.43E-05	2.45E-06	5.829029	0.0000
X3	-6.34E-05	1.08E-05	-5.891763	0.0000
X4	-4.45E-06	1.10E-05	-0.403868	0.6897

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995316	Mean dependent var	5278.233
Adjusted R-squared	0.994094	S.D. dependent var	3660.685
S.E. of regression	281.3308	Akaike info criterion	14.31790
Sum squared resid	1820382.	Schwarz criterion	14.64485
Log likelihood	-207.7685	Hannan-Quinn criter.	14.42250
F-statistic	814.5124	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.969537</b>
Prob(F-statistic)	0.000000		

n = 30

k = 4

dL = 1.1426

dU = 1.7386

4 - dL = 2.8574

4 - dU = 2.2614

## Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	30	66,85	270399,00	24647,9788	63168,74724
X1	30	12112354,00	255804611,00	60905321,0667	55838057,45847
X2	30	4465395,00	89483505,00	37180053,2333	21604036,08595
X3	30	203560000,00	1279295764,00	538194761,4667	278284341,97601
X4	30	1000000,00	99597200,00	40514354,0000	31055877,21919
Valid N (listwise)	30				

## Lampiran E. F tabel, T tabel dan DW tabel

## F Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

T tabel

df	Pr 0.50	0.25 0.20	0.10 0.10	0.05 0.050	0.025 0.02	0.01 0.010	0.005 0.002	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884	
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712	
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453	
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318	
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343	
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763	
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529	
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079	
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681	
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370	
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470	
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963	
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198	
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739	
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283	
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615	
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577	
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048	
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940	
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181	
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715	
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499	
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496	
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678	
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019	
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500	
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103	
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816	
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624	
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518	
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490	
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531	
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634	
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793	
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005	
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262	
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563	
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903	
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279	
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688	

**Dw Tabel**

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762